

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara garis besar, suatu pertumbuhan perekonomian dapat diartikan sebagai suatu kemampuan peningkatan dalam bidang ekonomi dalam menghasilkan atau memproduksi suatu barang dan jasa. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan bahwa sejauh mana segala kegiatan perekonomian akan dapat menghasilkan suatu pendapatan yang lebih besar bagi penduduk atau masyarakat dalam kurun waktu atau periode tertentu. Adapun yang dimaksud dengan aktivitas perekonomian itu sendiri merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka pada akhirnya proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang baik dan terus meningkat, maka pada akhirnya diharapkan pendapatan masyarakat atau penduduk dapat terus meningkat setiap waktunya (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi menurut pandangan Arsyad (2010) merupakan suatu peningkatan atau naiknya output masyarakat atau penduduk yang dilatar belakangi oleh semakin banyaknya atau semakin meningkatnya suatu jumlah faktor produksi yang dapat digunakan dalam memproduksi, tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri,

sebagai contoh ketika terjadi peningkatan output yang disebabkan oleh pertumbuhan atau perkembangan stok atau cadangan modal ataupun penambahan faktor produksi tanpa adanya perubahan yang dilakukan pada teknologi produksi yang lama.

Selain pengertian diatas, Kuznets dalam Jhingan (2000) juga mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan suatu negara dalam menyediakan barang-barang kebutuhan ekonomi masyarakat atau penduduk dalam jumlah dan jenis yang lebih banyak. Hal ini dapat tumbuh sejalan dengan perkembangan suatu teknologi yang sudah ada, dan penyesuaian kelembagaan serta ideologis yang diperlukannya.

Dengan demikian dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan atau perkembangan dalam berbagai kegiatan perekonomian yang memiliki ciri-ciri meningkatnya nilai output barang serta jasa sehingga pada akhirnya akan berdampak kepada pendapatan perkapita masyarakat atau penduduk yang terus meningkat.

Dalam prinsip ekonomi islam, pengertian pertumbuhan ekonomi seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun yang dimana menggambarkan hubungan antara rakyat akan berpengaruh terhadap syariah, akan berpengaruh terhadap pemerintah, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan atau ekonomi, akan berpengaruh terhadap keadilan, akan berpengaruh terhadap pembangunan.

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yang terdiri dari faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi mencakup sumber alam atau tanah, akumulasi modal, organisasi, dan kemajuan teknologi, sedangkan faktor non ekonomi seperti sumberdaya manusia dan faktor politik dan administratif.

Menurut Brata (2004) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Selain faktor diatas, Jhingan (2004) mengatakan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) mempunyai peran dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertama modal asing dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua pertumbuhan ekonomi meningkat harus diikuti dengan struktur produksi dan perdagangan di negara tersebut. Terakhir modal asing sebagai mobilisasi dana yang mempunyai peran penting. Ketiga hal tersebut

harus didukung juga oleh peran pemerintah yang menggunakan modal asing tersebut untuk keperluan membangun infrastruktur.

Kemudian penelitian World Bank (1978) mengungkapkan bukti bahwa Ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dan merupakan keharusan dari setiap negara yang ingin maju karena beberapa alasan, antara lain ekspor dapat menyebabkan penggunaan penuh sumber-sumber domestik sesuai dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan terjadinya pembagian kerja sehingga mendorong terjadinya skala penghematan (*economic scale*), selain itu ekspor dapat memperluas pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri, ekspor merupakan sarana untuk mengadopsi ide atau pengetahuan baru, teknologi baru, keahlian baru, serta keahlian lainnya sehingga memungkinkan penggunaan kapasitas lebih besar dan lebih efisien, ekspor dapat mendorong mengalirnya modal dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang, ekspor merupakan salah satu cara yang efektif untuk menghilangkan perilaku monopoli, karena produsen dalam negeri dituntut untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produsen lain di luar negeri, adanya ekspansi ekspor akan menghasilkan devisa dan karenanya kesempatan mengimpor barang-barang modal (*capital goods*) dan barang-barang antara (*intermediate goods*) semakin besar pula. Oleh karena itu, ekspor merupakan faktor penyebab naiknya pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara Afrika merupakan salah satu akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah banyak mendapat perhatian ekonom, baik di negara sedang berkembang maupun negara-negara industri maju (Tambunan, 1996).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini mengandung tiga hal pokok yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis, output per kapita mengaitkan aspek output total dan aspek jumlah penduduk, dan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang didorong oleh perubahan intern perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan output total dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari jumlah pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak. Sukirno (1998), mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang dihasilkan bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Irawan dan Suparmoko (2008) mengatakan bahwa lambat atau cepatnya suatu pertumbuhan perekonomian yang terjadi di suatu negara dapat disebabkan karena beberapa hal, diantaranya ialah kekayaan alam, kestabilan politik, jumlah tenaga kerja, kebijakan ekonomi pemerintah, dan kemampuan serta keahlian untuk dapat mengembangkan suatu teknologi. Beberapa pandangan menurut para ahli mengenai perkembangan atau peningkatan suatu perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Frederich List

Frederich List menilai bahwa peran pemerintah serta organisasi-organisasi swasta yang ada sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau peningkatan suatu perekonomian di negaranya. Selain itu, lingkungan kebudayaan juga memiliki peran yang tidak kalah penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan atau pengembangan suatu perekonomian.

2) Bruno Hilderbrand

Bruno Hilderbrand berpendapat bahwa perkembangan atau pertumbuhan suatu penduduk atau masyarakat lebih ditentukan pada metode distribusi yang digunakan oleh masyarakat tersebut, dan bukan dilihat dari sifat-sifat konsumsi dan produksinya.

3) Karl Bucher

Definisi perkembangan perekonomian menurut Karl Bucher melewati 3 tahapan, yaitu : perekonomian sebuah kota dimana pertukaran sudah mengalami perluasan yang cukup besar, perekonomian nasional dimana peranan pedagang-pedagang menjadi lebih penting, serta suatu produksi yang digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam bukunya Adelfin (2016), dijelaskan bahwa Pendekatan Pembangunan Manusia dikembangkan pertama kali oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk program pembangunan yaitu United Nation Development Program (UNDP, 2008). Indeks Pembangunan Manusia merupakan konsep yang mendasari pembangunan untuk mencapai kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Upaya untuk mensejahterakan masyarakat di dalam pembangunan manusia mencakup tiga komponen dasar yaitu pendidikan, kesehatan serta pendapatan. Proses pembangunan sumber daya manusia adalah suatu proses yang berjangka panjang yang membutuhkan interaksi dari semua sektor yang akan terjadi dengan bertahap (Adelfin, 2016)

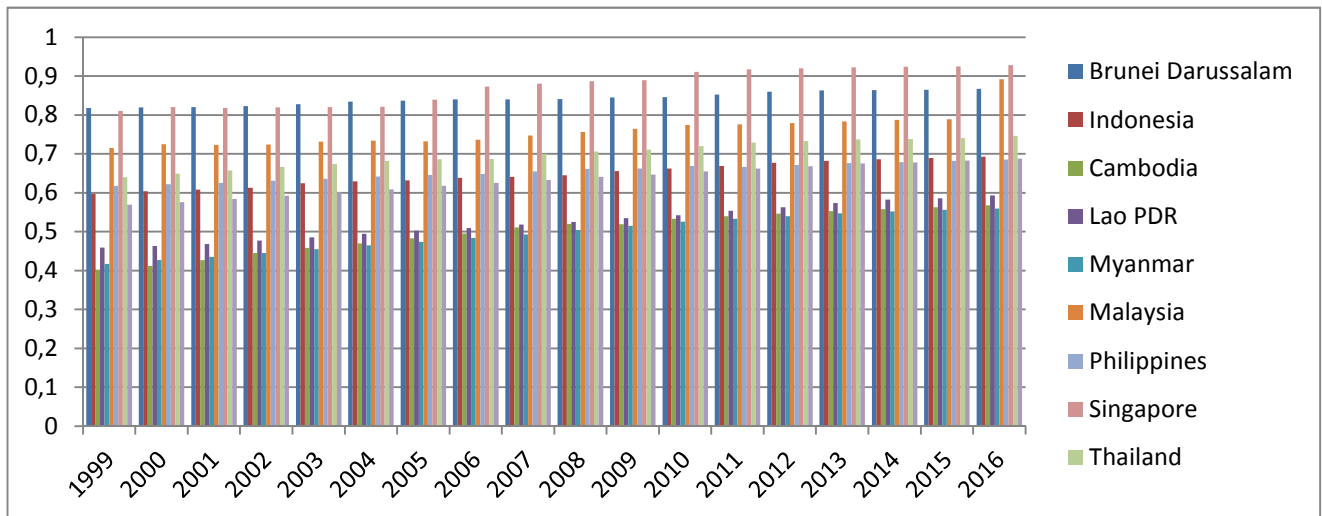
Dalam *Arab Human Development Report* (2002), pembangunan sumber daya manusia digunakan untuk mengembangkan masyarakat agar dapat membangun kemampuannya sendiri. Pembangunan manusia

menegaskan bahwa manusia harus turut serta berpartisipasi dalam merangsang proses-proses yang dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Dasar pembentukan Indeks Pembangunan Manusia ini adalah karena melihat ternyata betapa pentingnya memperhatikan kualitas dari sumber daya manusia.

Selain penjelasan diatas, Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal serta teknologi yang ada. IPM sendiri merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk dapat mengukur sejauh mana perkembangan pembangunan kualitas serta kuantitas suatu penduduk ataupun tenaga kerja. (Todaro, 2003).

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian IPM diatas, dapat disimpulkan bahwa IPM merupakan salah satu indikator terpenting dalam menciptakan kualitas masyarakat yang lebih baik serta mampu bersaing dengan masyarakat lainnya. Berawal dari penduduk yang berkualitaslah maka pada akhirnya akan dapat terwujud pertumbuhan perekonomian yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Berikut ini merupakan data pembangunan manusia pada masing-masing Negara ASEAN pada tahun 1999-2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : data diolah

Gambar II.1
Pertumbuhan indeks pembangunan manusia Negara ASEAN

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan manusia pada setiap Negara memiliki peningkatan yang berbeda-beda. Dari gambardiatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang paling tinggi terjadi di Negara singapura, sementara untuk pertumbuhan terendah terdapat di Negara Myanmar. Meskipun demikian, jika dilihat secara keseluruhan, hampir setiap tahun masing-masing Negara selalu mengalami peningkatan pada pembangunan manusia tersebut.

Suatu kinerja dari perumbuhan perekonomian dapat dipengaruhi oleh tingginya tingkat pembangunan manusia melalui kapabilitas penduduk yang pada akhirnya akan berimbas pada produktivitas yang meningkat serta kekreatifan masyarakat atau penduduk yang ada. Dengan demikian, maka masyarakat atau penduduk akan lebih mudah dalam mengelola serta mempelajari atau menyerap sumber daya yang dinilai

sangat penting bagi perkembangan perekonomiannya. (Brata, 2004).

Menurut Ananta (1986) ia berpendapat bahwa konsep mutu modal manusia sendiri mengacu pada suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi, serta biaya untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa yang akan datang.

Sebagaimana laporan UNDP (2005), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/ kapasitas manusia tersebut secara optimal
2. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
3. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan
4. Pembangunan bukan hanya dimaksudkan untuk pembangunan saja, tetapi juga dimaksudkan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.

5. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/ kapasitas manusia tersebut secara optimal
6. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Seperti yang telah diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. oleh karena itu menurut Maccari (2014) adapun indeks-indeks tersebut ialah :

1. Indeks pendidikan, yang diukur dengan mean geometrik dua komponen: Mean tahun sekolah untuk orang dewasa yang berusia 25 tahun indeks (MYSI) dan tahun-tahun sekolah yang diharapkan untuk anak-anak sekolah yang memasuki usia indeks (EYSI).
2. Harapan hidup saat lahir adalah ukuran yang dipilih untuk menggambarkan secara kuantitatif kualitas kehidupan manusia di setiap negara.
3. Indeks Penghasilan dimana Pendapatan Nasional Bruto per kapita mewakili komponen kekayaan indeks dengan paritas daya beli (purchasing power parity / PPP), yang menggantikan Produk Domestik Bruto yang lama.

Adapun rumus umum yang biasa digunakan ialah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (X1 + X2 + X3)$$

X1 : Indeks Harapan Hidup

X2 : Indeks Pendidikan

X3 : Indeks Standar Hidup

2.1.3 *Foreign Direct Investment (FDI)*

Krugman dalam Sarwedi (2002) mendefinisikan *Foreign Direct Investment (FDI)* sebagai suatu arus modal internasional yang mana suatu perusahaan dari negara tertentu dapat mendirikan atau hanya memperluas perusahaannya yang sudah ada di negara tujuan investasi. Oleh sebab itu dengan adanya hal demikian maka selain pemindahan sumber daya alam juga melakukan pengontrolan di negara luar. Penanaman modal atau investasi langsung ini dilakukan untuk dapat membantu atau mendorong suatu pertumbuhan perekonomian serta membimbing sektor non migas yang berdaya saing di tingkat internasional. *Foreign direct investment* ini selain meliputi tentang transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan negara luar, juga mekanisme yang dapat memberikan peluang bagi investor luar negeri atau investor asing untuk dapat memahami manajemen atau perencanaan yang akan dilakukan serta peran kendali dari perusahaan dalam negeri, lebih khususnya lagi yang terdapat dalam *corporate governance mechanism*.

Dalam jurnal ekonomi dan studi pembangunan yang ditulis oleh Agustina dan Nurul, dijelaskan bahwa *Foreign Direct Investment (FDI)*

adalah investasi langsung yang diberikan oleh individu atau perusahaan ke dalam suatu bisnis atau perusahaan di negara lain, baik dengan membeli sebuah perusahaan di negara tujuan atau dengan memperluas operasi bisnis yang sudah ada. Di era globalisasi ini FDI memegang peran yang penting dalam internasionalisasi bisnis. Selain itu, FDI juga dinilai mendorong pembangunan perekonomian karena bagi negara tujuan atau perusahaan lokal yang menerima investasi itu, FDI menjadi sumber tumbuhnya teknologi, proses, produk sistem organisasi, dan keterampilan manajemen yang baru. Tidak hanya itu, FDI juga dinilai dapat membuka jalur pemasaran baru bagi perusahaan dan juga fasilitas produksi yang lebih terjangkau atau lebih murah.

Dari dua pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam kurun waktu jangka panjang ke dalam sebuah perusahaan yang terdapat di negara lain. Selain itu, *Foreign Direct Investment* (FDI) juga adalah salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. *Foreign Direct Investment* (FDI) ini juga dinilai lebih berguna bagi sebuah negara jika dibandingkan dengan investasi yang ada pada ekuitas perusahaan karena hal ini dianggap akan dapat berpotensi terjadinya *capital outflow*, sebab investasi ekuitas ini dapat ditarik kembali secara tiba-tiba dan juga bersifat jangka pendek yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan terjadinya kerentanan perekonomian suatu negara.

Beberapa ilmuan diatas telah menjelaskan pengertian mengenai FDI, kemudian menurut Feldstein (2000) ada beberapa keuntungan yang didapat dari *Foreign Direct Investment* (FDI). Adapun keuntungan yang dimaksudkan ialah :

- a) Mobilitas modal secara global membatasi suatu kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang tidak benar atau kurang tepat diterapkan.
- b) Dengan melakukan diversifikasi yang dilakukan melalui investasi, aliran dari suatu modal akan dapat mengurangi resiko yang terjadi dari kepemilikan modal.
- c) Integrasi global pasar modal dinilai akan dapat memberikan spread terbaik dalam pembentukan legalitas, *corporate governance*, dan *accounting rules*.
- d) Secara garis besar mobilitas modal dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan atau membuat kebijakan yang tidak tepat.

Sarwedi (2002) mengatakan bahwa terdapat tiga ciri-ciri perusahaan dalam melakukan *Foreign Direct Investment* (FDI) antara lain :

- a) Perusahaan diwajibkan untuk mempunyai keunggulan atau kelebihan kepemilikan dibandingkan dengan perusahaan lain

- b) Keputusan *Foreign Direct Investment* (FDI) tersebut harus dapat memberikan hasil yang lebih unggul jika dibandingkan dengan menjual atau dengan menyewa saja.
- c) Keputusan *Foreign Direct Investment* (FDI) harus dapat lebih bisa menguntungkan jika dibandingkan dengan hanya menggunakan keunggulan tersebut dalam kombinasi atau gabungan dengan minimal beberapa input yang beralokasi di luar negeri.

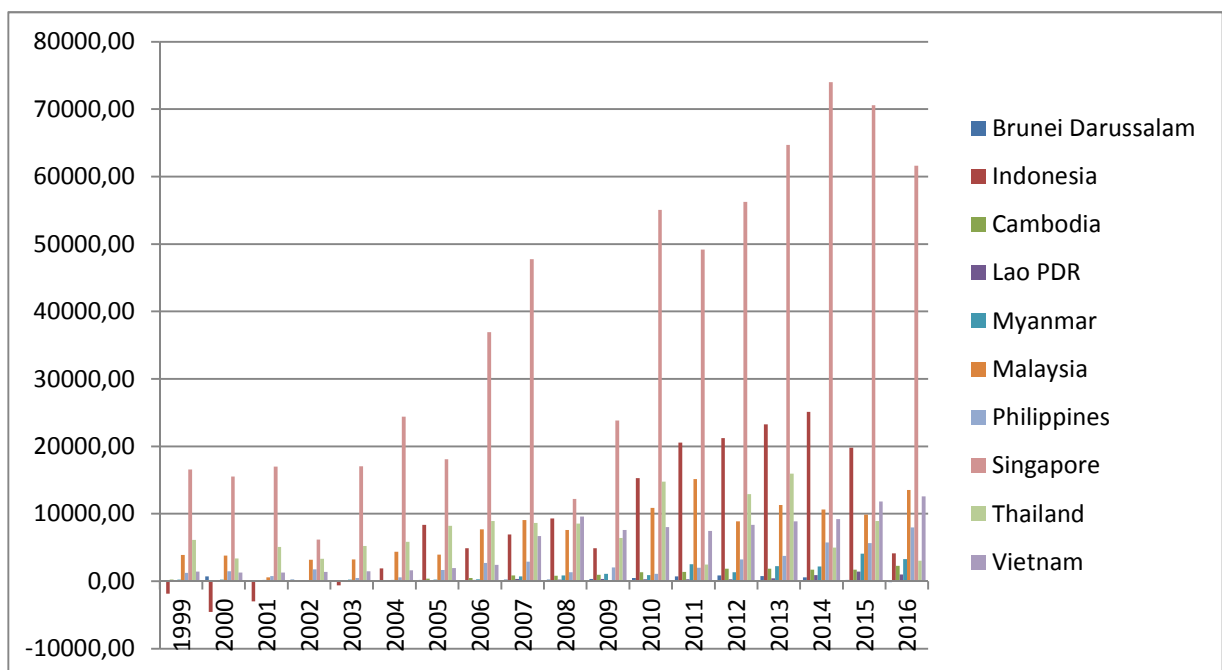
Menurut Adelia (2015) ada beberapa motif suatu negara melakukan investasi dalam bentuk FDI, diantaranya ialah :

- a) Untuk memiliki *competitive advantage* melalui *direct control*.
- b) Mendapatkan *return* yang lebih tinggi, perpajakan yang lebih menguntungkan, dan infrastruktur yang lebih baik.
- c) Menghindari hambatan tarif dan non-tarif sekaligus memanfaatkan berbagai insentif dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah lokal untuk mendorong FDI.

Kemudian, untuk investasi asing yang terdapat di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: Portfolio, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan credit ekspor. *Foreign Direct Investment* (FDI) mengikut sertakan pihak dari investor itu sendiri secara langsung dalam berbagai kegiatan yang terdapat pada bagian operasional usaha yang dilakukan sehingga pada akhirnya dinamika usaha yang menyangkut

tujuan perusahaan tidak akan lepas dari berbagai pihak yang berkepentingan/ investor asing, Purnomo dan Ambarsari (2005).

Investasi asing langsung atau FDI (Foreign Direct Investment) dinilai dapat memberikan peranan penting bagi negara-negara diseluruh dunia khususnya pada negara-negara berkembang dan tentunya juga negara ASEAN. FDI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Berikut ini merupakan data investasi asing yang terjadi di negara ASEAN pada tahun 1999-2016. Adapun datanya dapat di lihat melalui gambar berikut ini :



Sumber : data diolah

Gambar II.2
Foreign Direct Investment Negara ASEAN

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Negara tujuan investasi asing yang sangat banyak diminati adalah pada Negara singapura. Dari gambar diatas didapat kesimpulan bahwa banyak investor asing yang sangat tertarik dalam berinvestasi di singapura. Selain singapura, Malaysia juga termasuk Negara yang memiliki pertumbuhan yang baik dalam segi penanaman modal asing di negaranya. Indonesia sendiri masih sangat kecil untuk menjadi sasaran para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, penanaman modal asing sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang tersebut penanaman modal asing diartikan sebagai aktivitas penanaman modal asing oleh investor asing yang dilakukan di Indonesia baik itu dengan modal asing seluruhnya atau dengan pembagian engan pemodal atau investor dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Adapun definisi modal asing dalam perundang-undangan ialah :

- a) Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini keuntungan yang diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.
- b) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

- c) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.

2.1.4 Ekspor

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah pabean, dan barang yang telah masuk dalam sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah dalam negeri dianggap telah menjadi barang ekspor.

Selain undang-undang diatas, Baldwin (2005) dalam bukunya juga menjelaskan bahwa Ekspor adalah salah satu kegiatan perekonomian yang mempunyai peranan sangat penting yang dilakukan dengan melalui perluasan pasar di beberapa negara tujuan ekspor, di mana kegiatan ekspor ini dapat dilakukan dengan cara perluasan dalam suatu sektor industri, sehingga selanjutnya dapat memberikan kontribusi dalam industri yang lain, yang pada akhirnya diharapkan dapat pula mendorong sektor lainnya dari aspek perekonomian.

Selain perundang-undangan dan dari salah satu buku diatas, dalam buku lain yaitu bukunya sadono sukirno juga dijelaskan bahwa Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir. Permintaan ekspor

adalah jumlah barang/jasa yang diminta untuk diekspor dari suatu Negara ke negara lain. Selain itu didalam bukunya juga dijelaskan beberapa manfaat dari kegiatan ekspor itu sendiri. Adapun manfaat tersebut diantaranya ialah (Sukirno,2010) :

1. Menambah Devisa Negara

Perdagangan antarnegara membuka peluang bagi produsen ataupun penjual Indonesia untuk bisa menjual atau mengekspor barang dagangannya kepada masyarakat luar negeri. Transaksi ini dinilai dapat menambah pendapatan devisa negara dalam negeri. Dengan demikian, kekayaan negara akan bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan pendapatan negara.

2. Memperluas Pasar bagi Produk Indonesia

Kegiatan ekspor merupakan salah satu cara atau langkah yang dapat dilakukan untuk memasarkan atau menjual produk dalam negeri ke luar negeri. Misalnya, pakaian batik merupakan salah satu produk Indonesia yang mulai dikenal oleh masyarakat dunia. Apabila permintaan terhadap pakaian batik buatan Indonesia semakin meningkat, pendapatan para produsen batik semakin besar. Dengan demikian, kegiatan produksi batik di Indonesia akan semakin berkembang dan pada akhirnya akan dapat berdampak pada pendapatan dalam negeri dan juga berdampak pada pertumbuhan perekonomian suatu negara.

3. Memperluas Lapangan Kerja

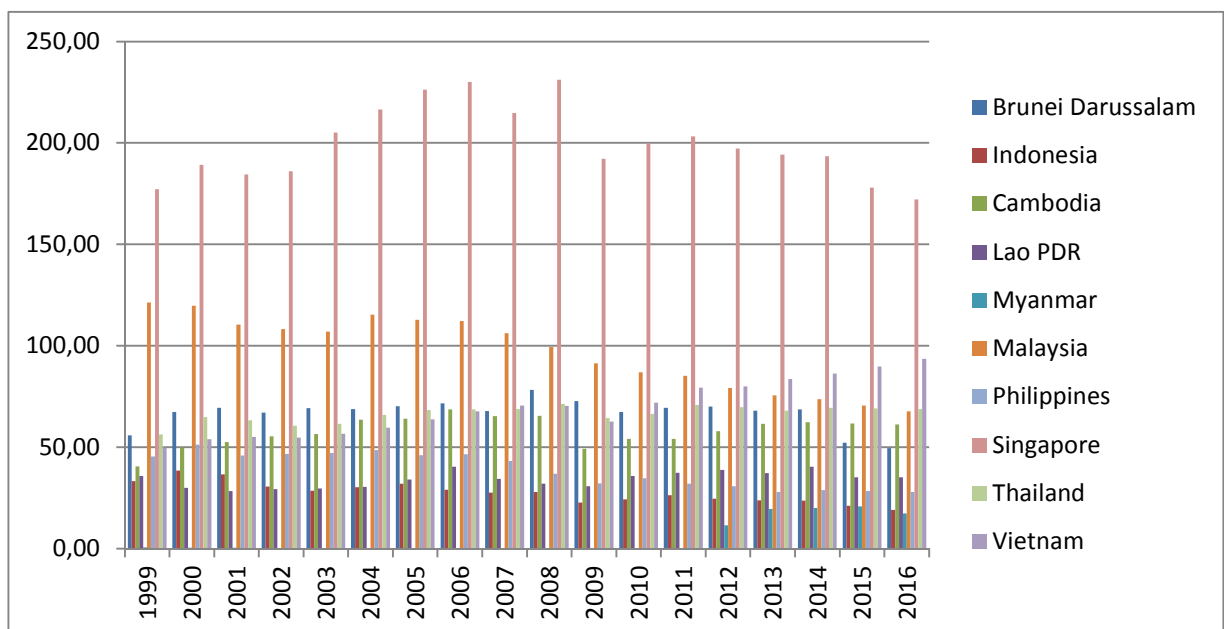
Kegiatan ekspor dinilai dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat atau penduduk dalam negeri. Dengan semakin luasnya pasar bagi produk Indonesia, kegiatan produksi di dalam negeri akan lebih meningkat dari biasanya. Sehingga akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan, dan peluang kerja bagi masyarakat akan semakin luas.

Ekspor merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan sangat penting dalam merangsang serta menumbuhkan perekonomian yang akan terjadi di negarnya. Selain itu, ekspor juga dinilai dapat membuat kapasitas konsumsi suatu negara menjadi lebih besar atau lebih banyak, dan juga output dunia akan menjadi lebih meningkat, serta memperlihatkan akses-akses ke sumber daya yang jarang di temui serta pasar-pasar internasional yang cukup potensial untuk segala bentuk produk ekspor yang mana jika tanpa produk-produk ekspor tersebut, maka negara-negara miskin atau negara-negara yang kurang berkembang tidak akan mampu mengembangkan serta meningkatkan taraf kehidupannya dan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian nasionalnya. Selain itu, ekspor juga dinilai dapat memberikan kemudahan bagi semua negara dalam menjalankan berbagai usaha-usaha pembangunan mereka melalui promosi serta penguatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, baik itu berupa ketersediaan faktor-faktor produksi tertentu dalam jumlah

yang cukup banyak, keunggulan efisiensi atau produktifitas tenaga kerja. Ekspor juga dapat memberikan kontribusi dalam memperoleh keuntungan yang cukup besar bagi negaranya. (Todaro & Smith, 2004)

Adapun keuntungan yang didapat dari sebuah kegiatan ekspor diantaranya ialah pendapatan nasional negara akan meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan jumlah output suatu negara dan laju pertumbuhan perekonomian negara tersebut. Dengan demikian, diharapkan lingkaran kemiskinan akan berkurang dan pada akhirnya peningkatan pembangunan perekonomian kan lebih ditingkatkan (Jhingan 2000).

Berikut ini merupakan kegiatan ekspor yang terjadi pada Negara ASEAN dari tahun 1999-2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : data diolah

Gambar II.3
Ekspor Negara ASEAN

Dari gambar diatas di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekspor terbaik terjadi pda Negara singapura. Kemudian pertumbuhan untuk masing-masing Negara cukup fruktatif di setiap tahunnya. Indonesia sendiri untuk pertumbuhan ekspor yang paling rendah terjadi pada tahun 2008-2009. Hal tersebut tentunya merupakan salah satu akibat atas terjadinya krisis pada tahun 2008 yang lalu.

Menurut Lubis dalam Putra (2004) (dalam achmad Rinaldy 2017), terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi ekspor suatu negara, yaitu :

1. Faktor Pasar Internasional merupakan faktor yang berasal dari luar negara pengekspor yang dinilai akan dapat berpengaruh pada kondisi atau keadaan ekonomi suatu negara eksportir sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kegiatan ekspor itu sendiri. Adapun faktor-faktor pasar internasional yang dimaksudkan antara lain adalah harga internasional, dan nilai tukar.
2. Faktor domestik merupakan faktor yang berasal dari dalam negeri pengekspor yang dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi negara eksportir sehingga dapat mempengaruhi kegiatan ekspor. Adapun faktor domestik yang dimaksudkan antara lain adalah produksi domestik, harga domestik, dan kebijakan domestik.

Tambunan (2001) (dalam Rinaldy 2017) mengatakan bahwa ekspor mempunyai peranan yang cukup penting dalam menggerakkan laju pertumbuhan perekonomian suatu negara yang keuntungannya akan dapat digunakan sebagai biaya impor dan juga pembangunan-pembangunan perekonomian yang dilakukan di dalam negeri. Dalam laporan Asian Development Bank (ADB) yang disampaikan oleh Apridar (2012) pendorong perkembangan atau pertumbuhan perekonomian yang terjadi di sebagian besar negara di Asia Tenggara dipengaruhi oleh besar kecilnya kegiatan di bidang sektor ekspor.

Dari berbagai penjelasan diatas, penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri guna untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Negara.

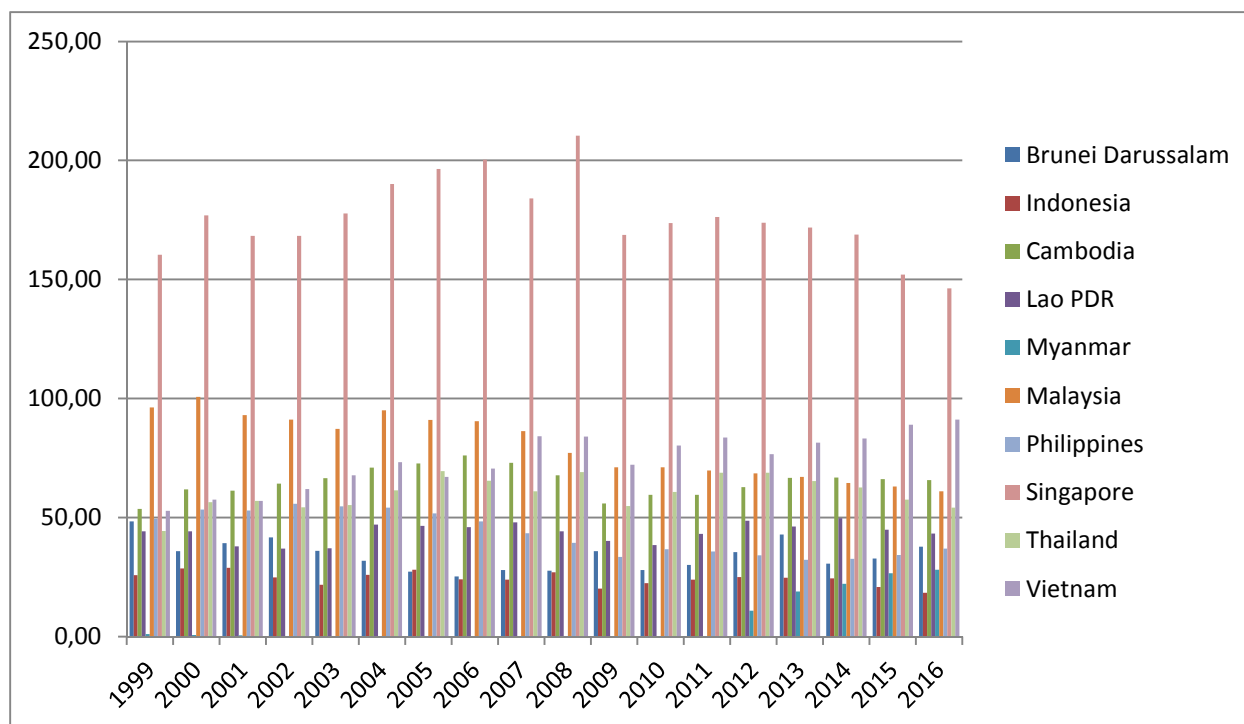
2.1.5 Impor

Dalam buku Tanjung (2011) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari luar negara ke dalam negeri dengan syarat tidak melanggar aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah yang mana peraturan tersebut sudah berlaku secara hukum.

Setelah mengetahui definisi impor yang terdapat pada buku Tanjung tadi, salah satu ahli yang bernama Susilo mengartikan kata impormerupakan kegiatan memasukkan barang dari suatu negara tertentu (luar negeri) ke dalam negeri dimana negara tersebut merupakan negara

tujuan impor. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi impor berarti kegiatan perekonomian yang dilakukan melibatkan dua negara yang saling berhubungan. Terjadinya suatu transaksi ini bisa disebabkan oleh kepentingan dua perusahaan yang ada di dua negara tersebut dimana negara yang satu bertindak sebagai supplier, dan yang satunya bertindak sebagai negara penerima barang impornya. Kegiatan impor barang ini juga merupakan kegiatan jual beli barang dari negara lain ke dalam negeri yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan valuta asing (Purnamawati, 2013).

Dari beberapa pengertian mengenai impor diatas, Sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa impor ialah kegiatan perdagangan internasional antar dua negara yang dilakukan dengan cara memasukkan barang ke wilayah negara tujuan impor yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk. Berikut ini merupakan data impor Negara ASEAN pada tahun 1999-2016. Adapun datanya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : data diolah

Gambar II.4
Impor Negara ASEAN

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa impor yang terjadi di masing-masing Negara sangat berbeda nilainya. Dan pertumbuhannyapun sangat fruktatif. Begitupun dengan Indonesia. Perkembangannya tidak selalu menurun di setiap tahunnya. Hal ini bisa saja terjadi karena mungkin pada dasarnya Indonesia sendiri masih belum mempunyai teknologi yang cukup canggih untuk menghasilkan suatu barang yang menjadi bahan kebutuhan penduduk Indonesia sendiri. sehingga demi memenuhi kebutuhan, harus mengimpor barang dari luar negeri agar dapat memenuhi kebutuhan.

Dasar hukum peraturan mengenai Tata laksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata laksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah (Purba,1983).

Impor suatu Negara berkolerasi dengan pendapatan negara tersebut dan output secara positif. Besar kecilnya impor yang dilakukan suatu negara tergantung pada harga barang-barang yang dibutuhkan tersebut yang ada di luar negeri dan dalam negeri. Oleh sebab itu, tinggi dan rendahnya nilai impor akan dipengaruhi output dalam negeri dan harga relative antara barang-barang buatan atau hasil produksi dalam negeri dan produksi luar negeri. Impor merupakan kebalikan dari ekspor. Jika ekspor dapat dikatakan sebagai injeksi bagi perekonomian, namun impor justru merupakan kebocoran dalam pendapatan nasional.

Impor sendiri ditentukan oleh kesanggupan/kemampuan dalam menghasilkan barang-barang yang bersaing dengan buatan luar negeri. Yang artinya nilai impor akan bergantung dari nilai tingkat pendapatn

nasional Negara tersebut. Apabila tingkat pendapatan nasional semakin tinggi, serta semakin rendah kemampuan dalam menghasilkan barang-barang tertentu, maka imporpun akan semakin tinggi. Sebagai akibatnya, banyak kebocoran dalam pendapatan nasional. Secara sistematis, hubungan impor dengan pendapatan nasioanl dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$M = M_0 + mY$$

keterangan :

M = Jumlah Impor

M₀ = jumlah impor yang nilainya tidak ditentukan

m = Marginal Propensity to Impor

Y = pendapatan nasional

Sistem klasifikasi barang impor ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006. Sedangkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) for AFTA ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006.

HS (*Harmonize System*) adalah suatu sistem uraian klasifikasi barang yaitu dengan pemberian nomor yang diberikan untuk masing-

masing barang yang disamakan dan bisa dipergunakan untuk semua urusan perdagangan luar negeri. Dengan demikian maka akan menjadi jelas perbedaan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Dalam satu kelompok barang juga dapat dibedakan dalam kualitasnya, atau ukuran atau cara memprosesnya (Arbi, 2004: 6). Barang-barang diberikan nomor menurut jenisnya, kemudian setiap jenis tersebut dibedakan lagi secara khusus, tentang modelnya atau kegunaannya atau cara memprosesnya. Kembali kepada definisi UU Nomor 10 Tahun 1995 yang dikaitkan langsung dengan barang yang dapat diklasifikasikan dengan memberikan nomor. Nomor tersebut sangat berhubungan dengan tarif bea masuk untuk suatu barang impor dan tarif pajak ekspor untuk barang ekspor. Semua nomor HS yang ada di setiap barang oleh petugas Bea dan Cukai nantinya akan disamakan atau dicocokkan dengan dokumen yang ada yang dilaporkan pihak Importir. Jika terdapat kecurigaan dan/atau keraguan, maka petugas Bea Cukai secara selektif akan segera memeriksa kondisi barang impor tersebut (Arbi, 2004).

2.1.6 Inflasi

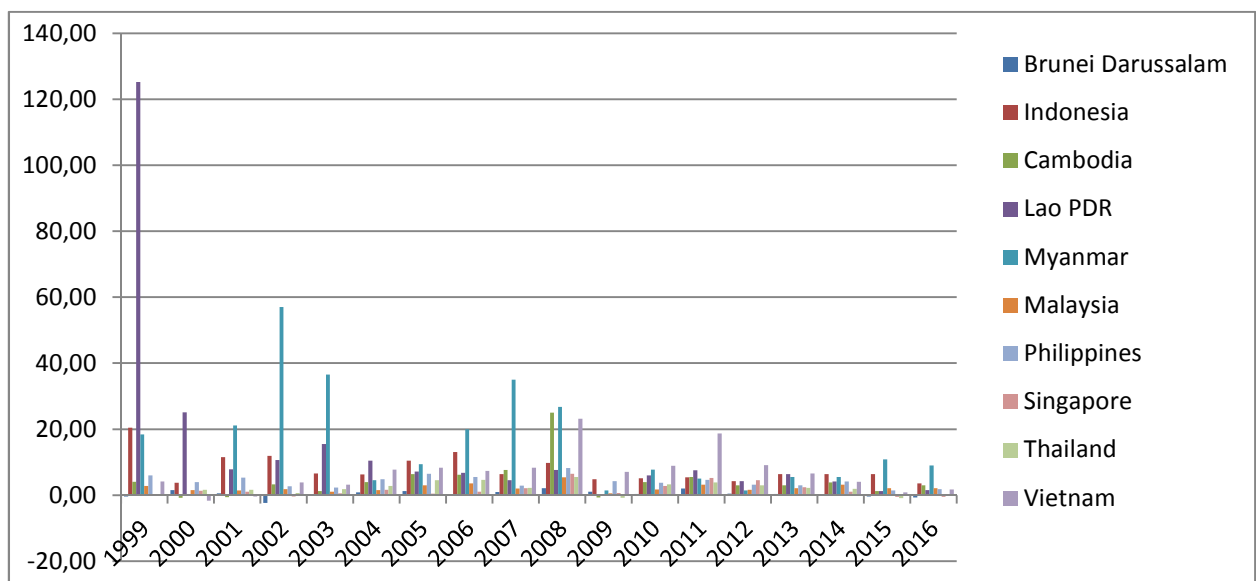
Secara garis besar inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat suatuharga barang-barang dan jasa secara global yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Jika terjadi kenaikan harga barang tidak secara umum, maka hal tersebut belum bisa dikatakan sebagai inflasi. Kecuali jika terjadi kenaikan barang yang satu akan berimbang pada kenaikan barang lainnya, maka hal tersebut baru bisa

dikatakan sebagai inflasi. Inflasi sendiri muncul karena terjadi tekanan permintaan suatu barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tertentu *demand-pull inflation* dan *cost-push inflation*. *Cost-push inflation* disebabkan karena turunnya produksi yang disebabkan oleh biaya produksi yang semakin tinggi, dan tingginya biaya produksi ini sendiri disebabkan kenaikan harga bahan baku industri, tidak efisiennya perusahaan, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh, dan sebagainya. Kemudian jika *demand-pull inflation* bisa disebabkan oleh permintaan agregat yang meningkat terlalu besar (Boediono, 2009).

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Menurut pandangan teori ini, proses inflasi terjadi karena nafsu manusia yang tidak pernah merasa puas atas rezeki yang didapat yang pada akhirnya mereka akan merebutkan harta benda atau kekayaan di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses inilah yang dinamakan dengan permintaan masyarakat lebih besar dari pada ketersediaan barang yang ada.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa disebabkan karena terjadinya inflasi. Selain itu, faktor lainnya yang juga dapat menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan

pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengendalikan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan data inflasi yang terjadi pada Negara ASEAN pada tahun 1999-2016.



Sumber : data diolah

Gambar II.5 Inflasi Negara ASEAN

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa inflasi tertinggi terjadi di Negara Myanmar tepatnya pada tahun 2002, kemudian tertinggi selanjutnya terjadi pada tahun 2003 dengan Negara yang sama. Untuk Negara lain dengan angka inflasi tertinggi terjadi pada Negara laos tepatnya pada tahun 2002. Indonesia sendiri bila dibandingkan dengan kedua Negara tersebut sangat jauh lebih rendah Indonesia. Inflasi tertinggi pada Negara Indonesia sendiri terjadi pada tahun 2009, dimana memang pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 telah terjadi krisis besar-besaran.

Kenaikan inflasi kemungkinan terjadi karena kenaikan harga bahan baku produksi (kenaikan biaya produksi) dan barang-barang impor, keadaan ekonomi yang tidak stabil, dan juga dapat terjadi karena faktor non ekonomi seperti kekacauan politik di dalam suatu negara. Sedangkan inflasi terendah terjadi di tahun 2009, yaitu 2,78%. Rendahnya tingkat inflasi ini dapat disebabkan oleh kondisi politik dan ekonomi suatu negara berada dalam keadaan yang stabil atau bahkan lebih baik dari tahun sebelumnya (Wardi, 2013)

Pengendalian inflasi merupakan salah satu hal yang harus menjadi fokus pemerintah dalam pengendalian harga, hal ini harus dilakukan karena adanya beberapa faktor yang dinilai dapat berdampak pada pertumbuhan perekonomian suatu negara adapun dampak negatifnya antara lain adalah : Pertama, inflasi dinilai dapat memperburuk distribusi pendapatan suatu negara atau dengan kata lain distribusi pendapatan suatu negara akan menjadi tidak seimbang. Kedua, inflasi dapat menyebabkan berkurangnya tabungan domestik yang dalam hal ini merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang. Ketiga, inflasi dapat mengakibatkan terjadinya defisit neraca perdagangan, selain itu juga inflasi dapat meningkatkan besarnya utang kepada luar negeri. Keempat, inflasi dinilai dapat menimbulkan ketidakstabilan politik. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi *stimulator* bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, laju inflasi yang terkendali juga akan dapat menambah keuntungan bagi pengusaha,

pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa datang dan pada akhirnya akan mempercepat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Sebaliknya tingkat inflasi yang tinggi akan berdampak negatif pada perekonomian yang selanjutnya dapat mengganggu kestabilan sosial dan politik. Dampak negative pada perekonomian diantaranya memperburuk distribusi pendapatan, tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi yang baik, dapat mengurangi semangat penanam modal, dan mengurangi daya beli masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya untuk mencegah agar jangan sampai penyakit ekonomi menjadi salah satu penghambat jalannya roda pembangunan perekonomian suatu negara (Sutawijaya dan Zulfahmi, 2012).

Berdasarkan teori struktualis terdapat dua faktor yang menjadi masalah utama yang dapat menyebabkan inflasi dalam negara berkembang, adapun faktor tersebut ialah :

1. Ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan dalam negeri, akan menyebabkan pertumbuhan produksi bahan makanan akan lebih lambat jika dibandingkan dengan pendapatan dan pertumbuhan penduduk, sehingga pada akhirnya harga bahan makanan cenderung akan lebih meningkat melebihi kenaikan harga barang-barang lain.
2. Ketidakelastisan penerimaan ekspor, yaitu perkembangan ekspor akan berjalan secara lamban dibanding sektor lain dalam perekonomian. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh harga

barang-barang komoditi negara-negara berkembang yang meningkat, sehingga dalam jangka panjang akibatnya perkembangannya sangat lamban dibanding dengan harga barang industri.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), dampak buruk dari terjadinya inflasi yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Tingginya tingkat inflasi dapat menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus mengalami kenaikan dapat menyebabkan kegiatan produktif menurun dan sangat tidak menguntungkan. Dengan terjadinya hal tersebut maka pemilik modal biasanya akan menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Selain itu, tingkat kegiatan ekonomi akan menurun dan akan berkurangnya investasi produktif. Dengan terjadinya hal-hal tersebut akan berakibat meningkatnya jumlah pengangguran.
2. Inflasi dan kemakmuran rakyat. Selain mengakibatkan dampak negative atas kegiatan perekonomian negara, inflasi juga tentu akan berdampak pada individu dan masyarakat yang ada.
3. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap. Pada dasarnya meningkatnya upah tidak secepat meningkatnya harga-harga barang pada umumnya. Maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang

berpendapatan tetap. Sehingga pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

4. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan dalam wujud berupa uang. Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan, nilai riilnya akan menurun apabila inflasi berlaku. Maka mereka akan mengenakan tingkat bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi pendapatan riil dan kekayaan yang menurun.
5. Memperburuk pembagian kekayaan. Telah diketahui bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi penurunan nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Sebagian penjual/pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan diantara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harga tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.

2.1.7 Pembiayaan Bank Syariah

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yang berarti ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Dari pengertian singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan pembiayaan adalah kepercayaan, dimana dalam hal ini berarti bank memberikan kepercayaan seutuhnya kepada nasabah atau peserta pembiayaan untuk bisa menjaga atau melaksanakan amanah serta mengelola dana yang telah diberikan oleh bank kepada nasabah yang bersangkutan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak antara pihak perbankan dan nasabah.

Pada umumnya, prinsip pembiayaan pada bank syariah dapat terbagi kedalam 3 bagian, yaitu : *Pertama*, pembiayaan modal kerja syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja agar dapat meningkatkan produksi, menambah keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* suatu barang. Pada umumnya, fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan perbankan ini bersifat jangka pendek yaitu dalam kurun waktu 1 tahun saja. Akan tetapi hal ini bisa diperpanjang apabila ada faktor tertentu yang menyebabkan perpanjangan harus diberikan (Karim, 2010: 234). *Kedua*, pembiayaan investasi syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat memenuhi kebutuhan barang-barang modal yang dibutuhkan oleh nasabah yang bersangkutan. Untuk pembiayaan jenis ini biasanya diberikan dalam jangka menengah dan jangka panjang. untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan, seperti pendirian modernisasi seluruh mesin dan teknologi, penggantian mesin dan peralatan lama, pabrik atau proyek baru, serta realokasi proyek baru yang lebih baik. *Ketiga*, pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang

diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan perusahaan terhadap barang atau jasa, tetapi bukan digunakan untuk usaha (Karim, 2010: 244).

M. Syafi'i Antonio (2001), dalam bukunya menjelaskan bahwa salah satu tugas utama dari perbankan ialah memberikan pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut merupakan pemberian fasilitas dana untuk nasabahnya demi memenuhi kebutuhan nasabahnya yang mengalami *deficit unit*.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1 Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.
- 2 Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 3 Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.
- 4 Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.

- 5 Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*'.

Secara global berdasarkan tujuan penggunaannya, produk pembiayaan menurut hukum ekonomi syariah terbagi dalam empat kategori yaitu:

- 1 Pembiayaan dengan prinsip Jual Beli (Ba'i)

Prinsip jual beli (Ba'i) adalah suatu prinsip jual beli yang dilakukan yang berhubungan dengan adanya perpindahan hak milik barang atau benda (*Transfer Of Property*), dimana tingkat keuntungan disepakati pada saat awal akad dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Murabahah
- b) Pembiayaan Salam
- c) Pembiayaan Istisna'
- d) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (Ijarah)

- 2 Berdasarkan prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a) Pembiayaan Musyarakah
- b) Pembiayaan Mudharabah

3. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap biasanya digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Namun, pada dasarnya akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meski demikian, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan sebuah akad. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

- a) Hiwalah (Alih Hutang-Piutang)
- b) Rahn (Gadai)
- c) Qardh (penyediaan dana tagihan)
- d) Wakalah (Perwakilan)
- e) Kafalah (Garansi Bank)

Siringoringo (2012) menyatakan fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuang yakni, proses penghimpunan dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada unit ekonomi. Salah satu saluran dimana intermediasi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu perkembangan pada sektor keuangan dapat mendorong peningkatan pada tingkat tabungan masyarakat. McKinnon (1973) mengemukakan bahwa *finacial deepening* tidak hanya meningkatkan

produktivitas modal tetapi juga tingkat tabungan, sehingga mampu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi perbankan secara eksplisit terlihat dari pembiayaan perbankan. Sejalan dengan semakin berkembangnya aktivitas perbankan dalam perekonomian, volume pembiayaan perbankan tentu akan terus meningkat. Kenaikan pembiayaan tersebut tentu akan mendorong permintaan agregat, baik melalui peningkatan konsumsi ataupun investasi.

Schumpeter melakukan observasi terhadap pasar financial sekitar 80 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa pasar keuangan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan cara mempertemukan dana dari penabung ke peminjam dengan cara efisien untuk memberikan fasilitas fisik dan inovasi bagi proses perbaikan. Prediksi Schumpeter diperkuat oleh beberapa penelitian terdahulu seperti King dan Levine (1993) yang menemukan bukti bahwa financial development sebagai prediktor ekonomi pembangunan dan pengembangan produktivitas yang akan datang. Juga efektivitas kebijakan ekonomi berhubungan secara positif dengan sistem kerja pembiayaan.

King dan Levin (1993) lebih lanjut menunjukkan hubungan antara perbankan dengan ekonomi makro dengan menyimpulkan bahwa pengaruh perbankan tidak hanya bersifat sementara saja, namun berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Berkembangnya sistem perbankan memiliki korelasi yang positif dan

hubungan yang signifikan terhadap pertumbuhan, investasi, dan efisiensi modal. Adapun produk yang ditawarkan oleh perbankan Islam pun cukup beragam dan tidak kalah dengan produk dari bank konvensional. Produk-produk yang terdapat dalam perbankan Islam pun baik secara langsung dan tidak langsung mampu berperan dalam mengatasi permasalahan dalam ekonomi.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Agar lebih mudah dipahami, penelitian terdahulu dalam tesis ini akan ditampilkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil
1	Badikenita (2008)	analisis kausalitas antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN tahun 1960-2002	negara Indonesia dan Malaysia terjadi pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ekspor, sedangkan di negara Thailand dan Philipina terjadi ekspor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di negara Singapura tidak terdapat kausalitas antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi.
2	Agatha Christy dan David Kaluge (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Asean Member Countries Pada Tahun 2011-2016	impor, ekspor, <i>foreign direct investment</i> , <i>competitiveness index</i> , <i>government expenditure</i> , dan <i>labor force</i> secara simultan berpengaruh pada variabel dependen pertumbuhan ekonomi (GDP).
3	Muhammad Febi Utama (2013)	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan	IPM dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi

		Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung	Lampung.
4	Deviantini (2012)	dampak FDI dan kinerja ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan studi komparatif negara maju dan negara berkembang	FDI secara signifikan mempengaruhi GDP. GDP secara signifikan berpengaruh terhadap tenaga kerja. Sementara antara variabel ekspor dan GDP, impor dan GDP, serta kapital dan GDP ditemukan hubungan kausalitas dua arah. Untuk kasus di negara maju, hasil analisis menunjukkan bahwa FDI merupakan faktor yang mempunyai pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi.
5	Indriana Mei Listiani (2016)	Analisis Perkembangan Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Malaysia dan Indonesia	Dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari perkembangan sektor keuangan total terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terdapat pengaruh negative dari perkembangan sektor keuangan total terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia.
6	Muhammad taufik (2014)	Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur	Variabel independen (investasi dan ekspor) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
7	Muhammad Sri wahyudi Suliswanto (2016)	Tingkat keterbukaan Ekonomi di Negara ASEAN-5	negara yang paling terbuka ekonominya yaitu negara Singapura disusul Malaysia, Thailand, Indonesia dan Filipina. Meskipun demikian, peringkat keterbukaan ekonomi jika dibandingkan dengan keberhasilan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) selama 10 tahun terakhir sedikit terjadi perbedaan.
8	Solihin (2016)	<i>The Islamic Banking And The Economic Integration In Asean</i>	Negara ASEAN yang tercatat memiliki bank syariah atau bank yang menjalankan transaksi

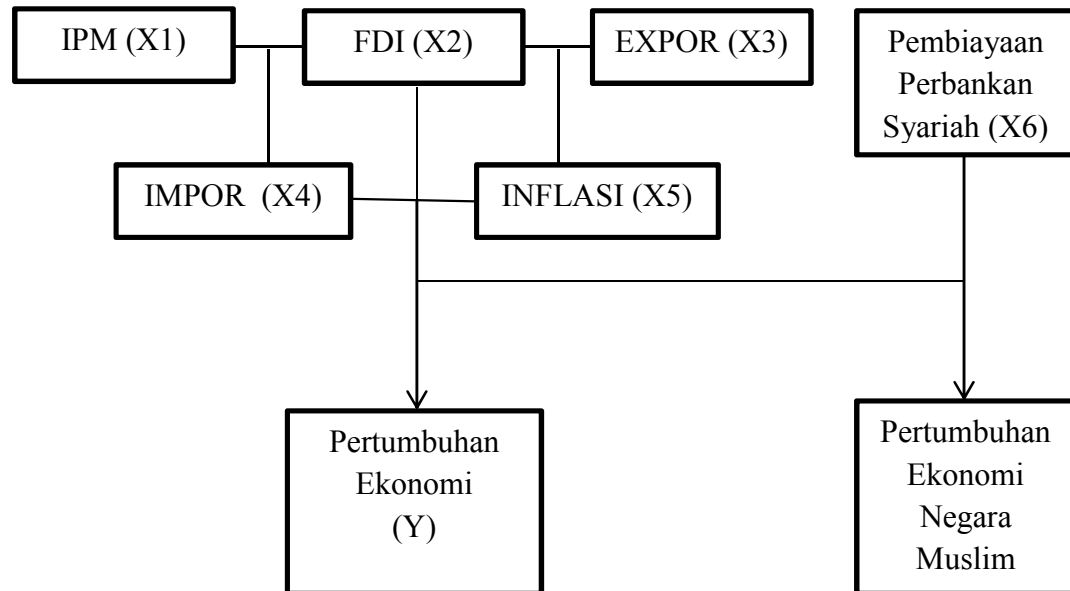
			syariah, kompetisi perbankan syariah hanya pada bank-bank syariah yang ada di Indonesia dan Malaysia. Tiga Negara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina tidak memiliki bank syariah yang cukup kuat untuk bersaing, walaupun efisien.
--	--	--	--

Sumber : Data Diolah

Dari beberapa penelitian terhadulu yang telah dilakukan serta dipaparkan diatas, variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian mengenai pertumbuhan perekonomian ialah ekspor, FDI dan index pembangunan manusia (IPM), dan dalam penelitian tersebut rata-rata variabel ekspor, FDI, serta IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian suatu negara. Namun, untuk variabel keuangan islam ternyata belum memberikan kontribusi yang dapat mendorong dalam pertumbuhan perekonomian itu sendiri.

2.3 KERANGKA PIKIR

Berdasarkan uraian diatas, variabel yang digunakan dalam kerangka pikir ini terdiri dari variabel IPM (X1), FDI (X2), Ekspor(X3), Impor (X4), dan Inflasi (X5) serta Pertumbuhan Ekonomi (Y). Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji pengaruh IPM, Investasi, Ekspor, Impor, dan Inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Negara ASEAN. Untuk memperoleh gambaran yang lebih sederhana, dapat dijelaskan melalui skema di bawah ini :



Sumber : data diolah

Gambar II.6
Kerangka Pikir

2.4 HIPOTESIS

Menurut Widarjono (2009), uji hipotesis adalah suatu prosedur untuk pembuktian kebenaran sifat populasi berdasarkan data sampel. Berdasarkan analisis pertumbuhan perekonomian Negara ASEAN yang telah dibahas baik pada teori dan juga hasil penelitian, maka diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN.
- H2 : FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN.

- H3 :Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN.
- H4 :Impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan negara ASEAN.
- H5 :Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara ASEAN.
- H6 :Pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Negara islam di ASEAN